

**TANGGUNG JAWAB HUKUM DALAM KASUS MAFIA TANAH DARI SUDUT
PANDANG HUKUM PERDATA NASIONAL (STUDI KASUS PERALIHAN HAK
ATAS TANAH KELUARGA NZ OLEH ASISTEN RUMAH TANGGA)**

ABSTRAK

Tujuan penulis membuat penelitian ini antara lain untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab hukum terhadap kasus mafia tanah dari sudut pandang hukum perdata dan juga untuk mengetahui upaya yang harus dilakukan dalam pengembalian kepemilikan yang sudah dialihkan ke pihak lain oleh mafia tanah. Penelitian ini memakai jenis penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Dalam mengatasi kasus mafia tanah, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional mengeluarkan Petunjuk Teknis Nomor 01/JUKNIS/D.VII/2018 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Mafia Tanah. BPN juga membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Pemberantasan Mafia Tanah serta membentuk program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Dalam kasus yang penulis pakai dalam penelitian ini yaitu kasus Keluarga NZ, diperlukan gugatan perdata dalam pengembalian kepemilikan yaitu sertifikat tanah yang sudah berbalik nama kepada pihak lain. Dalam gugatan tersebut, NZ harus bisa membuktikan hak yang ia dalilkan atau biasa disebut dengan asas *actory in cumbit probatio*.

Kata Kunci : Tanggung Jawab Hukum, Mafia Tanah, Pengembalian Kepemilikan.

**LEGAL RESPONSIBILITIES ON LAND MAFIA CASES FROM NATIONAL CIVIL
LAW PERSPECTIVE (CASE STUDY OF TRANSFER OF NZ FAMILY LAND TITLES
BY HER HOUSEHOLD ASSISTANT)**

ABSTRACT

The purpose of the authors in conducting this research is to find out how legal responsibility is for land mafia cases from the perspective of civil law and also to find out the efforts that must be made in returning ownership that has been transferred to other parties by the land mafia. This research uses a normative juridical research type using a statutory approach and a case approach. In dealing with land mafia cases, the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency issued Technical Instructions Number 01/JUKNIS/D.VII/2018 concerning Prevention and Eradication of Land Mafia. The National Land Agency has also formed a Task Force for the Prevention and Eradication of the Land Mafia and a Complete Systematic Land Registration program. In the case that the author uses in this study, namely the NZ family case, a civil lawsuit is required in returning ownership, namely land certificates that have changed their names to other parties. In the lawsuit, NZ must be able to prove the rights that it argues for or what is commonly known as the principle of actory in cumbit probatio.

Keywords : *Legal Responsibility, Land Mafia, Return of Ownership*